

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membahas respons kebijakan perdagangan Cina terhadap pemberlakuan Undang-undang National Defense Authorization Act (NDAA) 2019 oleh Amerika Serikat, yang mengatur adanya pembatasan untuk pemerintah federal untuk menggunakan atau bekerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi asal Cina. Penerapan Undang-undang ini telah menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap perusahaan-perusahaan Cina, terutama karena adanya pelarangan ekspor dan sanksi teknologi, yang kemudian memicu terjadinya perang dagang. Kondisi ini mendorong pemerintah Cina untuk mengembangkan strategi yang lebih adaptif dan terstruktur untuk melindungi serta memperkuat posisi global industrinya. Oleh sebab itu, respons Cina tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem perdagangan dan teknologi domestik yang dapat bersaing di ranah global.

Undang-undang NDAA 2019 ini merupakan bentuk proteksionisme non-tarif Amerika Serikat yang melarang penggunaan produk teknologi dari perusahaan-perusahaan Cina oleh lembaga pemerintah AS, termasuk Huawei, ZTE, dan Hikvision. Dengan dalih keamanan nasional, AS menargetkan dominasi teknologi Cina yang dianggap mengancam kepentingan strategis dan posisi hegemoni teknologi Amerika. Langkah ini memberikan tekanan langsung terhadap ekspor Cina di sektor teknologi tinggi, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi dan transformasi industri negara tersebut. Dalam menghadapi tekanan ini, pemerintah Cina mengambil strategi dari dua bentuk kebijakan perdagangan, yaitu proteksionisme dan peningkatan daya saing produk domestiknya khususnya pada sektor teknologi tinggi.

Kebijakan proteksionisme digunakan oleh Cina sebagai alat untuk melindungi pasar domestik dan memperkuat kontrol negara terhadap industri strategis, terutama dalam hal penguasaan data, pengamanan jaringan, dan pengawasan terhadap investasi asing di sektor teknologi. Tujuannya adalah membatasi campur tangan eksternal yang dapat melemahkan kedaulatan digital dan keamanan nasional. Sikap protektif ini juga

membuka ruang bagi tumbuhnya pengembangan inovasi lokal yang tidak tergantung pada teknologi luar. Di sisi lain, kebijakan peningkatan daya saing menjadi instrumen utama Cina untuk menghadapi tekanan eksternal. Salah satu strategi utama yang diambil pemerintah Cina setelah menyadari bahwa ketergantungan terhadap teknologi asing sangat rentan terhadap kondisi geopolitik, Cina mulai berfokus pada pengembangan teknologi domestik untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Pemerintah Cina secara sistematis meningkatkan anggaran riset dan pengembangan (R&D) setiap tahunnya, dengan fokus utama pada pengembangan eksperimental dan teknologi strategis seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, dan sistem operasi mandiri. Langkah ini tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan pendanaan nasional, tetapi juga melalui pembentukan lembaga pendanaan khusus seperti *Big Fund*. Cina juga menerapkan kebijakan yang memblokir perusahaan-perusahaan asing melalui *Unreliable Entity List*.

Selain itu, salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah Cina adalah mereformasi sistem dukungan ekspor mereka, melalui badan perencana ekonomi utamanya yaitu National Development and Reform Commission (NDRC), NDRC berperan sebagai badan yang merancang rencana pembangunan ekonomi jangka panjang Cina. NDRC kemudian menetapkan sektor teknologi tinggi sebagai prioritas utama dalam dokumen Rencana Lima Tahun ke-14 (2021–2025), serta mendorong pengembangan teknologi domestik untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Pemerintah juga memperkuat peran Sinosure sebagai lembaga asuransi ekspor nasional yang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap risiko komersial biasa, tetapi juga meliputi risiko politik dan geopolitik yang meningkat tajam setelah NDAA 2019 diberlakukan.

Di samping itu, pemerintah Cina melalui Exim Bank of China turut menyediakan skema pembiayaan ekspor jangka menengah dan panjang. Skema ini ditujukan untuk mendukung proyek teknologi bernilai tinggi yang memerlukan modal besar dan waktu implementasi panjang. Fungsi ini menjadi pelengkap dari jaminan yang diberikan Sinosure. Pemerintah Cina juga terus mengembangkan Zona Industri Teknologi Tinggi (HTIDZ) yang berperan besar untuk ekspansi industri strategis Cina. Cina

memanfaatkan HTIDZ sebagai kawasan unggulan untuk penerima subsidi, tax rebate, dan insentif PPh khusus. Selain itu, sebagai bagian dari strategi perlindungan ekspor dan respons terhadap tekanan eksternal seperti NDAA 2019, Cina juga memberlakukan tarif balasan terhadap barang-barang asal Amerika Serikat,

Cina juga kerap merespons Undang-undang NDAA 2019 dengan strategi diversifikasi pasar ekspor melalui penguatan aliansi alternatif seperti BRICS dan RCEP. Melalui BRICS, Cina berhasil memperluas pasar ekspor teknologinya dan menciptakan pertumbuhan signifikan dari tahun 2022 hingga 2024. BRICS bukan hanya menjadi jalur ekonomi, tetapi juga menjadi forum strategis untuk memperkuat posisi Cina di ranah global. Sementara itu, RCEP juga menjadi salah satu alat untuk mendorong ekspor teknologi tinggi Cina di kawasan Asia-Pasifik, terutama setelah mulai berlaku pada tahun 2022. Nilai ekspor ke negara-negara RCEP meningkat pesat, dengan kontribusi utama dari produk bernilai tambah seperti kendaraan listrik, baterai litium, dan peralatan komunikasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa respons kebijakan perdagangan Cina terhadap pemberlakuan Undang-undang NDAA 2019 oleh Amerika Serikat tidak hanya mencerminkan bentuk perlawanan terhadap tekanan eksternal dan perang dagang yang semakin memanas, tetapi juga menandai pergeseran mendasar dalam arah pembangunan nasional Cina. Melalui kombinasi strategi jangka panjang, mulai dari kebijakan proteksionisme, mengembangkan kemandirian teknologi domestik, reformasi sistem ekspor, hingga diversifikasi pasar global, Cina berhasil membangun fondasi yang lebih tangguh dalam menghadapi tantangan geopolitik.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang bisa diterapkan secara langsung. Pemerintah Indonesia bisa belajar dari langkah-langkah yang diambil Cina, terutama soal cara menghadapi tekanan dari luar negeri lewat penguatan teknologi dalam negeri dan kerja sama dagang dengan negara-negara lain di luar blok Barat. Pemerintah juga bisa mulai memikirkan kebijakan ekspor yang lebih tahan terhadap perubahan global, misalnya lewat pemberian

insentif atau perlindungan khusus untuk produk unggulan nasional. Untuk pelaku usaha, khususnya di bidang teknologi, sebaiknya mulai mempersiapkan strategi jangka panjang seperti perlindungan risiko ekspor dan kerja sama dengan lembaga pembiayaan negara. Selain itu, penting juga untuk menjalin lebih banyak hubungan dagang dengan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika sebagai pasar alternatif. Langkah ini bisa membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional seperti Amerika Serikat.

6.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi tambahan dalam memahami respons suatu negara terhadap tekanan ekonomi eksternal. Untuk pengembangan ke depan, disarankan adanya studi perbandingan yang menelaah respons kebijakan dari negara-negara lain terhadap sanksi, agar dapat diidentifikasi strategi mana yang paling efektif. Penelitian ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggabungkan pendekatan ekonomi dan politik secara bersamaan, mengingat kebijakan ekspor tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik global. Selain itu, penggunaan pendekatan kuantitatif juga penting untuk menghasilkan temuan yang lebih terukur, misalnya dengan menghitung dampak langsung kebijakan Cina terhadap nilai ekspor teknologi tinggi. Terakhir, perlu ada kajian yang lebih mendalam mengenai peran lembaga-lembaga negara dalam menjaga kestabilan perdagangan nasional saat menghadapi tekanan ekonomi global.